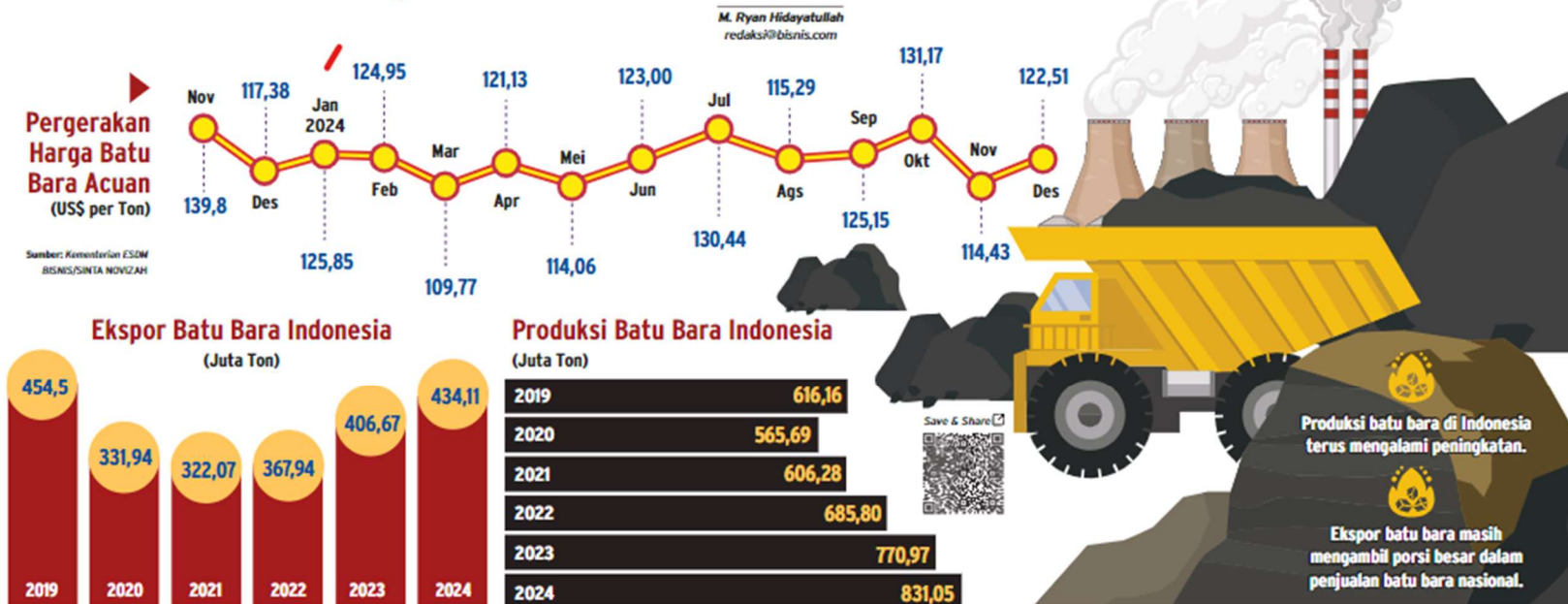


| PENGELOLAAN TAMBANG BATU BARA |

# ANCANG-ANCANG MATANG ORMAS KEAGAMAAN

Sejumlah organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mulai mengambil ancang-ancang kuat agar bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan batu bara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B yang diberikan oleh pemerintah.



**P**engurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) langsung mengalkulasi pelaksanaan penghiliran batu bara sesuai membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara sebagai badan usaha yang bakal mengelola pertambangan batu bara.

Sejumlah kajian dilakukan untuk memastikan penghiliran tidak berimpak negatif terhadap bisnis batu bara PBNU. Musababnya, PBNU belum benar-benar melakukan penambangan batu bara, sehingga belum memutuskan desain penghiliran yang bakal dilakukan nantinya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa penghiliran batu bara yang bakal dilakukan oleh PBNU melalui Berkah Usaha Muamalah Nusantara nantinya bergantung kepada hitung-hitungan investasi bisnis yang dilakukan.

"Jangan sampai karena seolah-olah kami mendapat konsesi, lalu NU [Nahdlatul Ulama] rugi. Tentu saja harus tetap ada keuntungan dari pengembangan yang akan dilakukan nantinya," kata Yahya beberapa waktu lalu.

Yahya membeberkan bahwa NU saat ini menyiapkan proses eksplorasi batu bara di wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah.

Hal itu dilakukan bersamaan dengan studi lingkungan seperti yang disyaratkan oleh negara.

Selain itu, NU juga masih mencari investor untuk membiayai kegiatan reklamasi di wilayah izin usaha pertambangannya, sebagai salah satu syarat pengoperasian tambang.

"Pemerintah sudah ada aturan tentang itu [reklamasi]. Sebelum mulai [menambang batu bara], kami diwajibkan menyetor uang jaminan reklamasi

yang jumlahnya besar, maka kami harus cari investor yang bisa membantu kami melakukan pendanaan itu nantinya," ucap Yahya.

NU mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal seluas 25.000—26.000 hektare di Kalimantan Timur.

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah tidak ingin terburu-buru menyampaikan rencana bisnis batu baranya.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas belum mau berbicara banyak terkait dengan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan eks PKP2B Adaro Energy yang diberikan oleh pemerintah.

"Kalau sudah Pak Bahlil [Menteri ESDM Bahlil Lahadalia] yang bicara, baru kami yakin dan percaya," kata Anwar kepada *Bisnis*, Sabtu (11/1).

Anwar beralasan pihaknya belum menerima langsung wilayah izin usaha pertambangan seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah.

"Kalau wilayah izin usaha pertambangannya belum di tangan, saya belum mau bicara," ucapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik Adaro Energy.

"Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kami sudah positif [akan memberikan] yang eks-Adaro," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1).

Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi bahwa Muhammadiyah telah menetapkan pilihannya, karena sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada ormas ke-

**Kami harus cari investor yang bisa membantu kami melakukan pendanaan itu nantinya.**

agamaan, yakni di bekas lahan Adaro Energy atau Arutmin Indonesia.

Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan.

Luas lahan bekas PKP2B milik Adaro Energy mencapai 7.437 hektare, sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki Arutmin Indonesia seluas 22.900 hektare.

Meski begitu, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy dalam kesempatan terpisah menyatakan pihaknya telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai *holding* dan perusahaan operator.

## PRODUKSI BATU BARA

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara di dalam negeri menembus 831,05 juta ton sepanjang 2024.

Mengutip data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kemen-

terian ESDM, realisasi tersebut telah mencapai 117,05% dari target target produksi 2024 yang sebesar 710 juta ton.

Lebih terperinci, dari total produksi emas hitam itu, penyerapan untuk domestik tercatat mencapai 378,95 juta ton. Sementara itu, realisasi untuk ekspor sebesar 434,11 juta ton, sedangkan untuk *domestic market obligation* (DMO) mencapai 209,93 juta ton.

Kemudian, penjualan batu bara sepanjang 2024 mencapai 813,06 juta ton, realisasi ekspor mencapai 114,52% dari target penjualan batu bara pada tahun lalu.

Di sisi lain, pemerintah meloloskan 736 rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pertambangan batu bara untuk periode 2024—2026. Jumlah tersebut belum termasuk 66 RKAB yang ditolak, 120 RKAB dikembalikan, dan lima RKAB lain yang sedang dalam proses evaluasi lanjutan.

Dari sisi komoditas, batu bara memang menjadi RKAB yang paling banyak diajukan. Tercatat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM telah menerima 927 RKAB batu bara per 20 Desember 2024, dengan rincian 736 RKAB disetujui, 66 RKAB ditolak, 120 RKAB dikembalikan, dan lima RKAB permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Titi Winarno memastikan bahwa seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Perbaikan regulasi ini menjadi bagian dari langkah kami untuk memastikan proses

perizinan RKAB berjalan secara transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan," katanya.

Menggeliatnya batu bara juga sejalan dengan proyeksi International Energy Agency (IEA) yang menyebut bahwa permintaan batu bara global bakal tembus ke level 8,9 juta ton pada 2027, atau 1% lebih tinggi dari estimasi *demand* yang akan terjadi pada tahun ini. Padahal, sebelumnya IEA meneropong permintaan batu bara bakal turun secara konsisten mulai tahun ini.

Terus meningkatnya permintaan batu bara secara global juga mencerminkan bahwa upaya mengatasi problem perubahan iklim secara kolektif sedang menghadapi tantangan.

Padahal, penggunaan batu bara mesti turun drastis mulai dekade ini agar bisa mencapai target *net zero emission* pada 2050 dan membatasi pemanasan global sesuai dengan kesepakatan Paris.

"Analisis kami menunjukkan permintaan batu bara secara global bakal mencapai titik jenuh hingga 2027,

meski konsumsi listrik meningkat tajam. Namun, faktor cuaca akan berdampak besar pada tren jangka pendek untuk permintaan batu bara. Kecepatan pertumbuhan permintaan listrik juga akan sangat penting dalam jangka menengah," kata Keisuke Sadamori, Director of Energy Markets and Security IEA, dikutip dari *Bloomberg*.

Penurunan penggunaan batu bara di Eropa dan Amerika Serikat yang cukup signifikan pun belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan dari China dan India. ☐

Data Jumlah Penyelesaian Permohonan RKAB Komoditas Mineral dan Batu Bara per 26 Desember 2024

32